

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, dan KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MOCH BOGIK HAFIT SAPUTRA ADI
0913010043/FE/EA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2013

SKRIPSI
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, dan KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri)

Disusun Oleh:

MOCH BOGIK HAFIT S A
0913010043/FE/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada tanggal 31 Juli 2013

Pembimbing:
Pembimbing Utama

Tim Penguji:
Ketua

DRA.EC.SARI ANDAYANI, M.Aks

DR.HERO PRIONO,SE. Msi,Ak
Sekretaris

DRA.EC.TITUK DW,M.Aks
Anggota

DRA.EC.SARI ANDAYANI, M.Aks

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Dr. H. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM
NIP. 196309241989031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan melimpahkan karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun skripsi ini berjudul

“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran perpajakan Wajib pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran, serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Skripsi ini penulis persembahkan terutama untuk keluarga tercinta, kedua orang tuaku serta adikku, terimakasih atas doa, dukungan dan pengertiannya yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik atas bimbingan, bantuan, semangat,

dorongan, maupun doa dan kasih sayang yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Icshanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs . Ec. H. Rahman Amrullah Suwaidi, MS, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs . Ec. Saiful Anwar, M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Dr. Hero Priono, M. Si, Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dra Sari Andayani. M,Aks selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
8. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, untuk itu Penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun karena hal itu sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 7 Mei 2013

Penulis

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, dan KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri)

Oleh :

MOCH BOGIK HAFIT SAPUTRA ADI
0913010043/FE/EA

ABSTRAKSI

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat (masyarakat/penduduk) kepada pemerintah. Pajak atau iuran wajib tersebut merupakan salah satu unsur penerimaan atau pendapatan negara / pemerintah uang secara strategis diperhiungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri.

Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri yang berjumlah 5648 wajib pajak. Teknik penentuan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling sebanyak 100 responden wajib pajak Pajak Bumi Dan Bangunan dengan menggunakan rumus Slovin.

Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan uji hipotesis uji kecocokan model (Uji F) dan uji t. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN LISAN

HALAMAN PENGESAHAN MENYUSUN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu.....	10
2.1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian yang Dilakukan Sekarang dengan penelitian terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Sumber Penerimaan Daerah.....	13
2.2.2 Pajak	16
2.2.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	18
2.2.4 Teori perilaku wajib pajak.....	23
2.2.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.2.5.1 Sejarah.....	25
2.2.5.2 Ketentuan Umum.....	27
2.2.5.3 Objek Pajak.....	28
2.2.5.4 Subjek Pajak.....	29

2.2.5.5	Tarif Pajak.....	30
2.2.5.6	Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak.....	31
2.2.5.7	Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang.....	31
2.2.6	Pemahaman Akan Undang- Undang Perpajakan.....	32
2.2.7	Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak.....	33
2.2.8	Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.2.9	Pengaruh Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
2.2.10	Pengaruh Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	37
2.2.11	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	39
2.3	Diagram Kerangka Pikir.....	40
2.4	Hipotesis	41

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variable.....	42
3.1.1	Definisi Operasional.....	42
3.1.2	Pengukuran Variable.....	45
3.2	Sampel, dan Teknik Penarikan Sample.....	48
3.2.1	Populasi.....	48
3.2.2	Sampel.....	48
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.3.1	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.3.2	Metode Pengumpulan Data.....	50
3.4	Uji Kualitas Data.....	50
3.4.1	Uji Validitas.....	51
3.4.2	Uji Reliabilitas.....	51
3.4.3	Uji Normalitas.....	52
3.4.4	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.5	Teknik Analisis.....	54

3.6 Uji Hipotesis.....	55
------------------------	----

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	58
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pajak Kecamatan Ngadiluwih.....	58
4.1.2 Sejarah Singkat Obyek Penelitian.....	58
4.1.3 Kondisi Geografis Kecamatan Ngadiluwih.....	59
4.1.4 Struktur Organisasi.....	59
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	60
4.2.1 Gambaran Umum Penelitian.....	60
4.2.2 Pemahaman Wajib Pajak atas PBB (X1)	64
4.2.3 Kesadaran Wajib Pajak (X2)	68
4.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	72
4.2.5 Keberhasilan Penerimaan PBB (Y)	76
4.3 Uji Kualitas Data.....	81
4.3.1 Uji Validitas.....	81
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	83
4.3.3 Uji Normalitas.....	83
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	84
4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	84
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	85
4.5 Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	87
4.5.1 Persamaan Regresi.....	87
4.5.3.1 Hasil Uji F.....	90
4.5.3.2 Hasil Uji T.....	91
4.6 Pembahasan Hasil penelitian.....	93

4.7 Perbedaan Hasil Penelitian Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu	
.....	95
4.8 Keterbatasan Penelitian.....	96
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Diagram Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Ngadiluwih.....	60

DAFTAR TABEL

Table 1.1.	Data Penerimaan PBB di Kecamatan Magersari.....	6
Table 2.1.	Perbedaan Dan Persamaan Peneliti Yang Dilakukan Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.5.	Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1).....	81
Tabel 4.6.	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	82
Tabel 4.7.	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_3).....	82
Tabel 4.8.	Hasil Uji Validitas Variabel Keberhasilan Penerimaan PBB (Y)	82
Tabel 4.9.	Hasil Uji Reabilitas.....	83
Table 4.10.	Hasil Uji Normalitas	84
Table 4.11.	Hasil Uji Multikolonieritas	85
Tabel 4.12.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	86
Table 4.13.	Persamaan Regresi Linier Berganda.....	88
Table 4.14.	Hasil Uji F.....	90
Table 4.15.	Hasil Uji t.....	91
Tabel 4.16.	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuisioner
- Lampiran 2. Rekapitulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3. Uji Validitas
- Lampiran 4. Uji Realibilitas
- Lampiran 5. Uji Normalitas
- Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 7. Analisis Regresi Linier Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan dan Pembangunan Indonesia yang mempunyai tujuan akhir yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu Negara. baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. (www.jurnalskripsi.com)

Selama ini berlaku anggapan bahwa keberadaan sesuatu negara ditopang oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah teritorial jelas dan adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional, namun masih ada pilar yang keempat yang tak kalah penting, yakni topangan sistem perpajakan yang berjalan dengan baik, adil dan bersih. (www.jurnalskripsi.com)

Pemerintah daerah perlu menciptakan kondisi yang dapat memberikan iklim sehat, kondusif dan saling menguntungkan sehingga mampu menggerakkan niat dan minat para pengusaha dan para investor untuk berperan aktif melakukan kegiatan investasi diberbagai peluang dan sektor ekonomi yang ada. Dampak positif dari langkah tersebut adalah antara lain prospek peluang kesempatan kerja terbuka lebar sehingga berperan mengurangi tingkat pengangguran, mampu meningkatkan pendapatan baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun masyarakatnya, dan

sekaligus mampu meningkatkan nilai tambah bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya secara berkesinambungan akan mampu menggerakkan kehidupan sektor riil, mulai dari sektor perdagangan, industry, transportasi, perumahan, restoran, perhotelan sampai pada tingkat infrastrukturnya.

Sejalan dengan arah tujuan tersebut serta agar dapat meminimalkan kesenjangan kesejahteraan hidup antar lapisan atas, menengah dan bawah, maka pemerintah daerah harus senantiasa giat melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, antara lain dengan memberikan peluang kepada para pengusaha, baik dalam lingkungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun kepada para investor untuk saling bahu-membahu ikut berkiprah membangun tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berdaya-guna.

Dengan tumbuhnya tingkat perekonomian daerah yang ditunjang dengan peningkatan kegiatan kehidupan sektor riil dan infrastruktur tersebut, tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat nilai produktifitas usaha yang pada akhirnya bermuara pada penerimaan dan pendapatan daerah, khususnya di sektor perpajakan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat (masyarakat/penduduk) kepada pemerintah. Pajak atau iuran wajib tersebut merupakan salah satu unsur penerimaan atau pendapatan negara / pemerintah uang secara strategis diperhiungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD). Dengan kondisi demikian maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan dan pendapatan

negara / pemerintah yang sangat berperan dalam memberikan kontribusi penunjang kegiatan pembangunan negara baik di pusat maupun daerah.

Sejarah pemungutan pajak telah ada sejak jaman nenek moyang yang dikenal dengan upeti, yaitu pemberian hasil bumi kepada raja, hal ini yang kemudian melatarbelakangi adanya pemungutan pajak. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian suka rela oleh rakyat untuk raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan sebagainya. (Gardina dan Haryanto, 2006 : 10).

Tujuan pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan dibidang perpajakan tentunya guna meningkatkan pemasukan pajak kas Negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) seharusnya mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan dimasa yang akan datang. pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak (budgetair dan regulerend) salah satunya tentu saja membutuhkan system subsistem secara internal dan system yang lain secara eksternal (dengan peradilan pajak) dalam menunjang kebijakan pendapatan Negara (fiscal policy) (Sofyan, 2003:29)

Pajak telah mengalami masa-masa sulit dan gemilang di negara kita, yang indikasinya terlihat dari persentase penerimaan pajak dalam APBN dan APBD, untuk menyesuaikan pajak dengan iklim perkembangan yang dialami oleh negara kita, pemerintah telah melakukan reformasi terhadap perpajakan, baik atas pajak

pusat / nasional maupun pajak daerah. Reformasi pajak diupayakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, disamping itu juga sebagai reposisi pajak sebagai sumber penerimaan, baik itu pemerintah pusat (APBN) ataupun daerah (APBD), (Pandiangan, 2002 : 11).

Pada Official Assesment Sistem, petugas pajak berkewajiban menentukan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP), sedangkan pada Self Assesment Sistem, Wajib Pajak berkewajiban memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam pratiknya tetap memerlukan pengawasan dari pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya, (Sofyan, 2003 :30).

Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi budgetair (sumber pemerintah Negara) dan fungsi regulerend (mengatur). Fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi regulerend, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang keuangan. (Siti Resmi, 2007 : 3).

Tujuan pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan di bidang perpajakan tentunya guna meningkatkan pemasukan kas negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) seharusnya mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh

yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan di masa yang akan datang. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak (budgetair dan regulerend) salah satunya tentu saja membutuhkan sistem penetapan pajak yang efisien, fleksibel dan terintegrasi dengan sistem subsistem secara internal dan sistem yang lain secara eksternal (dengan peradilan pajak) dalam menunjang kebijakan negara (fiscal Policy), (Sofyan, 2003 : 29).

Pajak Bumi dan bangunan merupakan property di Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Pajak bumi dan Bangunan sebagai sumber, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah antara lain dipergunakan untuk penyediaan yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, oleh sebab itu, wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, (Suhardito dan Subidyo, 1999 : 3).

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai rupiah relatif kecil bila dibandingkan dengan pajak lain yang tersentralisir di pusat, namun di sisi lain PBB memiliki dampak yang lebih luas, satu dan yang lain karena penerimaan PBB di kembalikan untuk keperluan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki jumlah Wajib Pajak (WP) yang terbesar bila dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya, disamping itu, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia yang kecenderungannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau kenaikan.

Berikut pada bagian ini dapat dipaparkan fluktuasi ketetapan PBB dan Realisasi Penerimaan PBB di 10 Kelurahan Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri

Tabel 1
Pokok Ketetapan PBB dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Ngadiluwih
Kota Kediri

No	Tahun	Pokok Ketetapan PBB (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB (Rp)	Presentase (%)
1	2008	1.036.761.465,00	1.000.501.328,00	96,50
2	2009	1.012.421.128,00	1.000.139.211,00	98,78
3	2010	1.484.635.388,00	1.446.831.345,00	97,45
4	2011	1.566.082.348,00	1.498.001.126,00	95,65
5	2012	1.729.250.802,00	1.511.375.120,00	87,40

Sumber : Kantor Dispenda Kota Kediri

Dari data tabel 1 diatas terlihat jelas bahwa realisasi penerimaan PBB selalu dibawah Pokok Ketetapan PBB. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa :

1. Rata-rata realisasi penerimaan PBB (yang tertagih) di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri baru mencapai 95,12%, sedangkan 4,88% lainnya tidak tertagihkan.
2. Presentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri nampak fluktuatif dan tidak konstan dari tahun ke tahun, realisasi tertinggi adalah 98,78% dan yang terendah 87,40%

Penerimaan PBB yang selalu di bawah ketentuan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya pajak, meskipun telah dilakukan reformasi perpajakan, hal ini kemungkinan disebabkan karena keaneragaman tingkat pendidikan di dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh Wajib Pajak, maka semakin baik pemahaman mengenai ketentuan pajak yaitu PBB begitu juga sebaliknya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang cukup baik tentang pajak, sehingga masyarakat akan senantiasa membayar pajak dan menambah pendapatan daerah.

Dengan semakin pahamnya wajib pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak yaitu PBB. Selain pemahaman dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga harus diperhatikan oleh segenap instansi yaitu kantor Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam pembayaran atau pelunasan membayar pajak.

Sebagai mana di paparkan diatas, maka perlu diperhatikan pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, serta Kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB, dalam penelitian ini akan melihat pengaruh dari pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, serta kepatuhan Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, Dan KEPATUHAN WAJIB PAJAK

TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI Dan BANGUNAN (PBB). (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGADILUWIH KOTA KEDIRI)”

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan penelitian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menguji secara empiris Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak (WP), dan Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri

Dapat memberikan tambahan informasi tentang indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan Pajak Bumi Dan Bangunan khususnya adalah bagaimana Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib pajak.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat untuk tambahan referensi perkuliahan serta sebagai tambahan perpustakaan yang ada, khususnya yang berkenaan dengan materi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), peneliti berharap bahwa setiap pembaca memperoleh tambahan validitas wawasan bahan masukan sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penelitian lebih lanjut dikemudian hari.

c. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berkesempatan untuk dapat mengaplikasi teori-teori ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan menguji perumusan masalah secara empiris, tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.